

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum para ekonom moderen membahas masalah kemiskinan dalam konsep yang diperluas (Kurniasih, 2012). Kemiskinan disadari tidak hanya mengenai masalah ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki sumber pendapatan, tetapi mencakup juga pada aspek-aspek *social-deprivation* (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018). Namun dalam konteks negara berkembang, masalah kemiskinan masih berkisar pada dua aspek utama yaitu, tingkat kemiskinan itu sendiri dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi (Athoillah M. A., 2014).

Data terbaru mengenai kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2018) menyatakan bahwa angka kemiskinan menurun pada Tabel 1.1. Namun hal ini disebabkan pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat dalam menetapkan garis kemiskinan. Sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya (BPS, 2018). Diketahui penetapan garis kemiskinan nasional pada periode Maret 2018 oleh BPS (2018) adalah Rp 401 220 (atau sekitar USD \$29) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah bagi pengertian orang Indonesia sendiri (Darna & Fatimah, 2016).

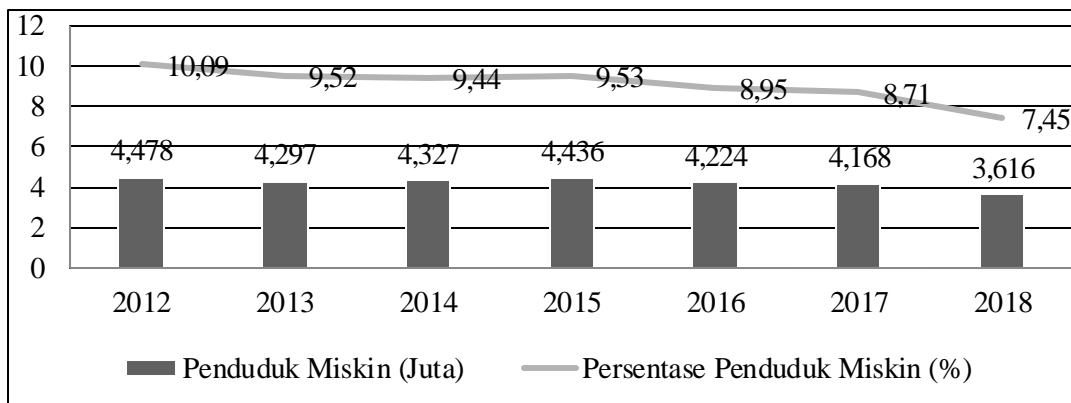
**Tabel 1.1**

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia Periode Maret 2007-2018 Tahun Ganjil

	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2018
<b>Kemiskinan Relatif (% dari populasi)</b>	16,58	14,15	12,49	11,36	11,22	10,64	9,82
<b>Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)</b>	37,17	32,53	30,12	28,17	28,59	27,77	25,95
<b>Koefisien Gini/ Rasio Gini</b>	0,35	0,37	0,41	0,41	0,41	0,39	0,39

*Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2007-2017 (data diolah)*

Pada periode Maret 2018, BPS (2018) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat sebanyak 3,615 juta jiwa penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin 7,45 % dan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional yakni sebesar Rp. 367.755. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2018) pada Gambar 1.1.



**Gambar 1. 1**  
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2018) periode 2012-2018 (data diolah)*

Provinsi Jawa Barat membagi beberapa wilayah dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Salah satunya Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang meliputi Wilayah Cirebon dan sekitarnya akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Berasal dari Eks-Karesidenan Cirebon yang merupakan bagian paling timur dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah III Cirebon secara geografi merupakan kumpulan dari daerah CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) dengan kategori daerah meliputi pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan (BKPP JABAR, 2018)

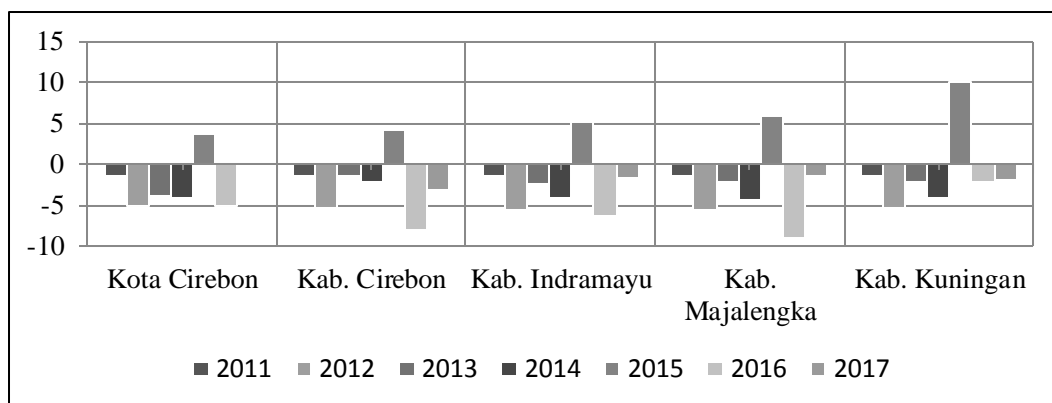
BPS Provinsi Jawa Barat (2018) menyatakan bahwa Wilayah III Provinsi Jawa Barat menyumbang 20% jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Barat atau sebanyak 852,21 ribu jiwa pada tahun 2016. Kemudian, menurut hasil survey Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan oleh [djawabarat.com](http://djawabarat.com) (2018) menyatakan daftar kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Barat. Pada urutan pertama ialah Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Kuningan, Cirebon dan Majalengka di urutan

Fitri Nurjanah, 2018

*PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN*

setelahnya yaitu kedua, ketiga dan keempat termiskin di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk daftar kota termiskin di Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon menempati posisi kedua setelah Kota Banjar. Sehingga dapat diartikan bahwa Wilayah III Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah koordinator daerah yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah koordinator lainnya. Walaupun penetapan garis kemiskinannya di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut BPS (BPS, 2018).

Selain penetapan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per



**Gambar 1. 2**

Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Wilayah III Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2018) periode 2012-2018 dalam satuan persen (data diolah)

kapita) yang rendah menyebabkan nilai dan persentase pada tabel dan grafik di atas akan terlihat tidak akurat karena nilainya seperti diturunkan beberapa persen (Indonesia-Investments, 2018). Menurut Bank Dunia (2005), jika kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$2 per hari, maka angkanya akan meningkat lebih tajam menjadi sekitar 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar [penduduk Indonesia](#) hidup hampir di bawah garis kemiskinan (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018).

Oleh sebab itu, dikarenakan kemiskinan merupakan masalah utama kemanusiaan (Badrudin, 2017). Dimana tidak hanya berbicara mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang mampu membeli barang dan jasa. Namun juga akan berdampak pada aspek-aspek *social-deprivation* lainnya seperti sosial, pendidikan, kesehatan, politik, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak asasi lainnya (Shaffer, 2008). Sehingga dalam menghadapi fenomena kemiskinan yang merupakan masalah besar dan selalu ada pada setiap masa, Rasulullah SAW-pun pernah berdoa Fitri Nurjanah, 2018

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN

memohon perlindungan kepada Allah SWT dari semua hal yang dapat melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahannya karena kemiskinan, tidak memiliki harga diri maupun karena nafsu yang menghinakan. Hal tersebut termaktub dalam sebuah Hadis berikut, *“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung kepada-Mu atas fitnah kemiskinan.”* (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Dengan demikian masalah yang menjadi penyebab lahirnya kemiskinan harus diketahui secara pasti supaya dapat disentuh dan diselesaikan (Athoillah A. R., 2015). Sebelumnya para peneliti di seluruh dunia telah berupaya menangani permasalahan pengentasan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Upaya tersebut masih berlangsung hingga kini melalui berbagai teori dan riset penelitian yang telah mencoba meneruskan solusi dan rekomendasi untuk memecahkan isu tersebut (Senadjki, 2015).

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di muka, penyebab lahirnya kemiskinan sangatlah rumit. Karena kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi geografis, tingkat pendidikan, serta sikap mental yang saling berkaitan satu dengan yang lain (Kasim, 2006). Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat terangkum menjadi tiga yaitu, faktor alamiah, faktor struktural, dan faktor yang berada di dalam diri orang miskin itu sendiri (Rejekiningsih, 2011).

Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, Shaikh (2016) mengatakan bahwa dunia memiliki sumber daya yang cukup hanya tidak terdistribusikan secara merata. Hal tersebut menandakan bahwa adanya kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tidak menerbitkan kesejahteraan. Akan tetapi melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Pemaparan tersebut merupakan pengertian dari sudut pandang penyebab kemiskinan struktural menurut BPS (2017).

Konsep pembangunan ekonomi masih menghadapi permasalahan ‘klasik’ antara pertumbuhan *versus* distribusi pendapatan. Salah satu teori ekonomi pembangunan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan (Indonesia-Investments, 2018). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) (Subandi, 2012). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Develop Countries/LDCs*) (Kuncoro, 2010). Terkait dengan hal tersebut, maka saat ini *pro-poor growth* menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai negara khususnya negara sedang berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan (Soleh, 2015).

Dalam hal ini yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Syahrul, 2009). Berdasarkan publikasi data BPS Prov. Jawa Barat (2018), PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp 1.786,09 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp. 37,18 juta, keduanya mengalami peningkatan. Serta memiliki laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2017 naik 5,29 persen dari tahun sebelumnya . Sedangkan Wilayah III Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, rata-rata PDRB atas harga berlaku mencapai Rp. 33038,6 Miliar dan memiliki kontribusi sebesar 13% terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2017). Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan mengenai kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Dalam fenomena kemiskinan, Islam mengakui dalam kehidupan pasti akan terjadi perbedaan dalam pendapatan ekonomi diantara para pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan *sunnatullah* (Indonesia-Investments, 2018). Namun fenomena tersebut tak pantas hanya diterima dan diratapi sebagai *qadarullah*. Padahal Allah SWT telah memberikan berbagai bentuk pilihan dalam *ikhtiar* untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (An-Nabhani, 2010). Menurut Qaradhawi (2005) ada beberapa cara

Fitri Nurjanah, 2018

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penanggulangan kemiskinan yaitu dengan bekerja, jaminan sanak keluarga jaminan negara dan melalui zakat.

Bukti historis menunjukkan bahwa Islam pernah berhasil mengentaskan kemiskinan dengan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasannya, yakni pada masa Khalifah Umar b. Abdul Aziz (w.101 H/720 M) (Athoillah A. R., 2015). Dikatakan bahwa sejumlah wilayah kekhilafahan dilaporkan telah mengalami *zero-poverty*, meskipun masa kekhilafahannya hanya sebentar (Athoillah M. A., 2014). Hal tersebut ditandai dengan jumlah pembayar zakat terus meningkat sementara jumlah penerima zakat terus berkurang bahkan habis secara *absolut*, sehingga negara mengalami surplus (Huda & Muti, 2011). Ketika hal ini terjadi, maka redistribusi kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara seperti biaya perkawinan (Ghofur, 2016).

Dengan asumsi bahwa semua informasi historis tersebut benar adanya, maka urgensi pengkajian tentang zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan tidak akan pernah kehilangan momentumnya (Beik I. S., 2009). Hal ini mendorong pemerintah setiap daerah memperhatikan peranan dana zakat yang dikelola BAZNAS setiap daerah sebagai usaha pengentasan kemiskinan (Marginingsih & Sasana, 2009). Sejalan dengan kewajiban membayar zakat yang akan lebih mudah bila didukung oleh pemerintah sebagai penghimpun sekaligus penyalurnya (Yussof, 2011). Hal tersebut secara tegas telah termaktub dalam al-Qur'an surat At-Taubah: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

**Artinya:** "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui."

Kata "ambillah" dalam firman di atas merupakan kata perintah untuk mengambil zakat yang ditunjukkan kepada sebagian manusia, dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mengurus umat (An-Nabhani, 2010). Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar Ra.: "Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian" (HR Baihaqi).

Fitri Nurjanah, 2018

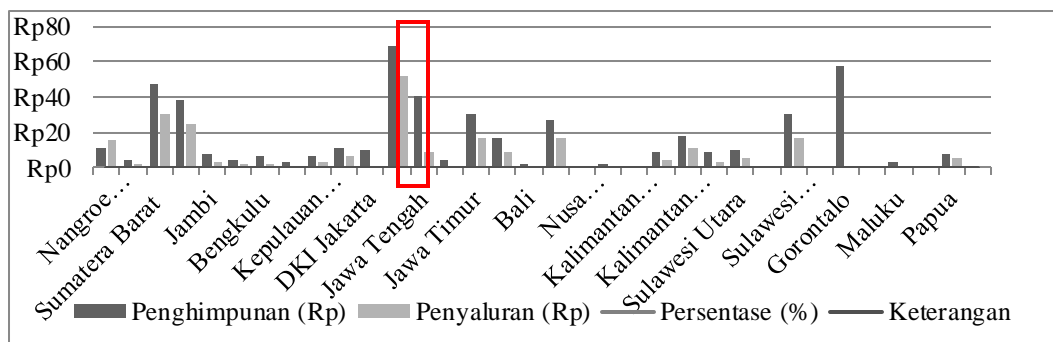
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal ini diperkuat oleh fakta sejarah atau *shirah* bahwa pengambilan zakat dilakukan pemerintah. Seperti ketika kepemimpinan dipegang oleh para Khalifah yang selalu mengutus petugas untuk mengambil zakat (Ghofur, 2016).

Riwayat lain juga memberikan panduan tentang pendistribusiannya yang lebih menitikberatkan pada semangat desentralisasi (Athoillah A. R., 2015). Artinya, bahwa dana zakat yang terkumpul itu harus didistribusikan secara prioritatif, baik para mustahiknya maupun wilayahnya di mana dana zakat tersebut berhasil dikumpulkan. Dalam sejumlah literatur, Mu'adz b. Jabal (w. 18 H/639 M) adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai petugas pengumpul zakat untuk wilayah Yaman sejak masa Nabi SAW hingga masa Khalifah Umar. Nabi SAW memerintahkan Mu'adz untuk mendistribusikan dana zakat dari muzakki Yaman kepada mustahik Yaman. Pada masa pemerintahan Umar b. Al-Khaththab, Mu'adz pernah membawa dana zakat dari Yaman ke pusat pemerintahan di Madinah. Akan tetapi Khalifah Umar menyuruhnya kembali ke Yaman untuk mendistribusikan dana zakat tersebut di wilayah Yaman (Athoillah M. A., 2014).

Melihat perkembangan regulasi zakat serta perkembangan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, PUSKAS BAZNAS (2018) memperkirakan tingkat pertumbuhan zakat akan mencapai sebesar 58%. Sehingga capaian penghimpunan zakat secara nasional pada tahun 2018 diproyeksikan dapat mencapai Rp. 8 triliun. Namun angka ini mengartikan bahwa tingkat pencapaian penghimpunan zakat masih berada pada kisaran 3,2 persen dari potensinya. Karena proyeksi potensi dana zakat di Indonesia masih begitu besar (Firdaus & al., 2012). Hal penting lainnya yang perlu dianalisis adalah ratio efektivitas penyerapan dana zakat atau disebut *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini dapat mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana distribusi dengan total dana penghimpunan (Beik I. H., 2015).



**Gambar 1.3**

ACR berdasarkan Provinsi di Indonesia periode 2017

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2017)

Berdasarkan penjelasan data dari PUSKAS BAZNAS (2018) pada Gambar 1.3. Diketahui bahwa penghimpunan dana zakat Provinsi Jawa Barat terbesar dibandingkan dengan Provinsi lainnya yakni sebesar Rp 68 miliar dengan ratio efektivitas penyerapan dana zakatnya (ACR) sebesar 74.82% yang berarti masuk dalam kategori *effective*. Hal ini menandakan bahwa masih ada gap antara penghimpunan dan penyaluran dalam dana zakat. Padahal seharusnya dana zakat tidak boleh bersisa (An-Nabhani, 2010).

Zakat merupakan alat distribusi pendapatan yang telah diakui secara historis dan normatif yang memiliki hubungan dengan kebijakan makroekonomi (Ghofur, 2016). Sebagaimana rekomendasi yang disampaikan Dornbusch (2004) dalam Athoillah M.A. (2014) bahwa menggeser (mendistribusikan) pendapatan kepada keluarga yang kurang mampu akan meningkatkan konsumsi secara keseluruhan dan menstimulasi perekonomian.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Suprayitno (2013) yang menggunakan data agregat Malaysia untuk menemukan bahwa distribusi zakat memiliki dampak positif namun kecil terhadap konsumsi agregat. Rekomendasi yang diberikan ialah agar distribusi zakat tidak harus terbatas pada kebutuhan konsumsi melainkan mencakup bentuk-bentuk bantuan moneter yang dapat menghasilkan dana kontinu pendapatan bagi penerima zakat. Selain itu studi empiris di Pakistan oleh Azam (2014) menyatakan bahwa zakat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara kemiskinan dengan pencairan zakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Fitri Nurjanah, 2018

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Penelitian lainnya dilakukan oleh Senadjki (2015) dengan menggunakan *Metode Generalized analisis Moments (GMM) panel* untuk periode 2001-2012 pada 14 negara bagian Malaysia. Tujuannya untuk menguji dampak pengeluaran zakat pada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dilihat dari koefisien gini, namun zakat secara signifikan mengurangi baik *poverty incidence* dan *hardcore poverty*. Rekomendasi yang diberikan khusus kepada institusi zakat agar mendistribusikan dana zakat sesuai dengan model *Had Al-Kifayah*.

Penelitian lainnya oleh Shaikh (2016) dengan tujuan memperkirakan potensi penghimpunan zakat di 17 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan membandingkan dana penghimpunan zakat dan PDB terhadap rasio jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa lembaga zakat memiliki potensi yang cukup untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Ditemukan potensi penghimpunan zakat dari sumber daya agregat pada 17 negara OKI apabila dikumpulkan bersama-sama maka akan cukup untuk pengentasan kemiskinan di seluruh negara OKI gabungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, melihat perkembangan penghimpunan dan penyaluran zakat serta pertumbuhan ekonomi regional yang ditandai dengan kenaikan PDRB yang meningkat setiap tahunnya. Seharusnya dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan yang diindikatori oleh jumlah penduduk miskin yang rendah. Walaupun kenyataan yang terjadi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat masih banyak khususnya di Wilayah III Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan penetapan garis kemiskinan perdatapan per bulan (per kapita) yang rendah yakni dibawah garis kemiskinan nasional menurut BPS Provinsi Jawa Barat (BPS, 2018). Masih tingginya angka kemiskinan di Wilayah III Jawa Barat merupakan masalah pokok yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul penelitian “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Penyaluran Zakat Terhadap Kemiskinan (Survey di Wilayah III Provinsi Jawa Barat Pada Periode 2011-2016)*”.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di muka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pertumbuhan ekonomi dan dana penyaluran zakat terkait dengan tingkat kemiskinan di Wilayah III Provinsi Jawa Barat periode 2011-2016?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi dan dana penyaluran zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Wilayah III Provinsi Jawa Barat periode 2011-2016?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pertumbuhan ekonomi dan dana penyaluran zakat terkait dengan tingkat kemiskinan di Wilayah III Provinsi Jawa Barat periode 2011-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah III Provinsi Jawa Barat periode 2011-2016.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan beberapa aspek manfaat yang dipilih penulis adalah sebagai berikut:

#### 1) Aspek Teori

Dapat menambah khazanah teori tentang ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya pada aplikasi sistem ekonomi islam dalam polimik pembangunan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pengembangan instrumen distribusi pendapatan perspektif Islam seperti zakat.

#### 2) Aspek Praktik

Kajian ini dapat dijadikan refrensi dalam praktik-praktik ekonomi pembangunan sesuai sistem ekonomi islam dan menjalankan konsep pengembangan intrumen distribusi pendapatan perspektif Islam seperti zakat.